

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan melanjutkan cita – cita perjuangan bangsa, yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia perlu mengadakan pembangunan secara berkelanjutan, dengan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun dan memperbesar kesadaran masyarakat akan arti dan manfaat pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memacu pembangunan.

Usaha pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dengan peningkatan sarana fisik untuk, menunjang sarana transportasi yaitu pembangunan ataupun perbaikan jalan demi kelancaran berlalu lintas.

Pembangunan harus didahului oleh perencanaan yang matang. Hal ini merupakan suatu upaya berkaitan dengan jasa konsultasi atau jasa konsultan, baik

dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan pekerjaan konstruksi, dan pembangunan tidak lepas dari kerja sama antara berbagai pihak yang di dalamnya diperlukan adanya suatu perjanjian khusus, yang dalam hukum perdata Indonesia membebaskan masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian – perjanjian yang dianggap perlu dibagi tujuannya.

Yang dimaksud layanan jasa konsultan pengawas konstruksi adalah suatu layanan jasa yang menyediakan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.<sup>1</sup>

Adapun tujuan pengawasan konstruksi adalah memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi dimulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Oleh Subekti, orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusialaan seperti yang diatur dalam bagian khusus Buku II BW.<sup>2</sup> Oleh KRMT Tirtodiningrat dijelaskan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat.

Diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang – Undang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang RI no18 tahun 1999 *Tentang Jasa Konstruksi* Pasal 1 Ayat 11

<sup>2</sup> Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa Jakarta. 1982. Hal 127

<sup>3</sup> KRMT Tirtodiningrat *Ikhtisar Hukum Perdata Hukum Dagang*. PT. Pembangunan . Jakrta 1966. Hal 83

Salah satu bentuk perjanjian peningkatan sarana fisik adalah perjanjian pemborongan perbaikan jalan, yang sekarang menggunakan istilah pekerjaan konstruksi, sesuai dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

Pengaturan tentang perjanjian ini diatur dalam KUH Perdata Undang – Undang RI No. 18 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah atau Tahun 2000. Pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.<sup>4</sup>

Peraturan standar untuk perjanjian pekerjaan konstruksi ( pemborongan ) adalah AV. 1971 ( *Algemeine Voot Warden Voor de Vitoering Bijaaneming van Open baret werken in Indonesia* ) yang artinya syarat – syarat umum untuk pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum di Indonesia<sup>5</sup>, yang ditetapkan dengan SK . Pemerintah Hindia Belanda Tanggal 28 Mei 1941 nomor IX.

Sering terjadi masalah dimana isi perjanjian kurang sesuai dengan norma – norma yang berlaku, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk memaparkan

permasalahan di dalam perjanjian pekerjaan konstruksi, maka penulis mengambil judul  
Skripsi: PERJANJIAN LAYANAN KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN  
KONSTRUKSI:

<sup>4</sup> Undang – Undang RI No Tahun 1999. *Tentang Jasa Kontruksi*. Pasal 1 Ayat 2

<sup>5</sup> FX Djumaldi. *Perjanjian Pemborongan*. Bina Aksara. Jakrta. 1991. Hal 3

Studi Tentang Perjanjian Antara CV. Millcon Dengan DPU Kabupaten Klaten Dalam Peningkatan Jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mencapai sasaran yang jelas dan sesuai dengan yang diharapkan, yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah pola – pola hubungan hukum yang terjadi di dalam perjanjian kontrak kerja layanan jasa konsultan pengawas pekerjaan konstruksi antar pengurus CV. Millcon dengan DPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan jalan Cawas-Kalisogo Kabupaten Klaten.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsultan pengawas pekerjaan konstruksi yang terlibat dalam perjanjian antara CV. Millcon dengan DPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan peningkatan jalan Cawas-Kalisogo Kabupaten Klaten.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan yang berarti untuk ilmu pengetahuan pada penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya, juga bagi para penulis selanjutnya.
  - b. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat tentang perjanjian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Praktis
- a. Memberikan masukan untuk para pihak yang bersangkutan di dalam perjanjian pekerjaan konstruksi tersebut.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam bidang perjanjian pekerjaan konstruksi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Obyektif
- a. Untuk mendeskripsikan pola – pola hubungan hukum yang terjadi di dalam perjanjian kontrak kerja layanan jasa konsultan pengawas pekerjaan konstruksi antara pengurus CV. Millcon dengan DPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan Jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten.
  - b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsultan pengawas pekerjaan konstruksi yang dalam perjanjian antara CV.Millcon

dengan DPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan peningkatan jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten.

## 2. Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dalam lapangan hukum perdata, khususnya menyangkut dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu kebenaran secara metodologis dan sistematis, artinya dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah dan sesuai dengan pedoman dalam suatu karya ilmiah.

Metode – metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal ( normatif), karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga – lembaga yang lainnya yang ada di dalam masyarakat<sup>6</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Ghalia Indonesia . Jakarta 1988. Hal 13-14

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang pola – pola hubungan hukum yang terjadi dan perlindungan hukum bagi antara CV. Millcon dengan DPU Kabupaten Klaten dalam perjanjian peningkatan Jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten.<sup>7</sup>

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>8</sup>
- b. Data primer, yaitu berupa keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak – pihak yang memahami persoalan yang telah diteliti<sup>9</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang cara mencari dan mempelajari data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>7</sup> Soejono Soekemto 1986. *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta Hal 250

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1988. Hal. 53

<sup>9</sup> Ibid Hal 53

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten, mengenai obyek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengumpulan data, ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data- data<sup>10</sup>

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data normatif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dimulai dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan yang dimulai dengan menginventarisasi norma – norma dan doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang diperlukan, untuk tahap selanjutnya data – data yang sudah diperoleh tersebut akan didiskusikan dengan norma dan doktrin yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan diketahui taraf kesesuaian antara data dengan norma dan doktrin tersebut.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mengetahui dan mempermudah perolehan gambaran tentang hasil penelitian, penulisan akan mengemukakan sistematika skripsi adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moeloeng 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Hal 12



- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Manfaat Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat syahnya Perjanjian
  - 3. Asas hukum Perjanjian
  - 4. Wanprestasi dan akibat hukumnya
  - 5. Overmacht dan akibat hukumnya
- B. Tinjauan Tentang Kontrak Kerja Konstruksi
  - 1. Pengertian Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi
  - 2. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi
  - 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi
  - 4. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi
- C. Tinjauan Tentang Konsultan Pengawas

1. Pengertian Konsultan Pengawas
2. Hak Dan Kewajiban Konsultan Pengawas
3. Tanggung Jawab Konsultan Pengawas

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pola – pola hubungan hukum yang terjadi di dalam perjanjian kontrak kerja layanan jasa konsultan pengawas pekerjaan konstruksi antar pengurus CV. Millcon dengan DPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten
- B. Perlindungan hukum bagi konsultan pengawas pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan peningkatan jalan Cawas - Kalisogo Kabupaten Klaten.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN